

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama terkait ambivalensi diplomasi hak asasi manusia Indonesia dalam merespons dua kasus pelanggaran HAM besar: Rohingya di Myanmar dan Uighur di Tiongkok pada periode 2020–2024. Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara demokratis dengan identitas normatif yang menjunjung tinggi HAM, diperkuat melalui keanggotaannya dalam Dewan HAM PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Identitas ini tidak hanya diklaim secara internal, tetapi juga diakui oleh struktur internasional melalui keikutsertaan Indonesia secara berkelanjutan sebagai anggota Dewan HAM PBB sejak 2006 hingga 2026. Namun, realisasi identitas ini tidak berlangsung seragam dalam dua kasus konflik tersebut. Dalam isu Rohingya, Indonesia tampil proaktif melalui diplomasi kemanusiaan dan politik kawasan, sementara dalam isu Uighur, Indonesia cenderung bersikap pasif, menghindari konfrontasi terbuka, dan tidak menunjukkan tindakan substantif di forum multilateral. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa identitas Indonesia sebagai promotor HAM mengalami selektivitas aktualisasi. Dengan demikian, identitas tidak dapat dipahami sebagai atribut tetap, melainkan sebagai hasil dari interaksi sosial yang bersifat situasional, seperti yang ditekankan dalam teori konstruktivisme Wendt.

Dalam konflik Rohingya, Indonesia mengaktualisasikan peran normatifnya melalui berbagai tindakan konkret. Pemerintah memprakarsai formula diplomatik 4+1, memimpin pengiriman bantuan kemanusiaan, serta membangun Rumah Sakit Indonesia di Rakhine, Myanmar. Indonesia juga secara aktif mendorong implementasi Five-Point Consensus ASEAN dan menyampaikan seruan dalam forum OKI serta sidang Dewan HAM PBB. Tindakan ini sejalan dengan identitas tipe Indonesia sebagai negara demokrasi dan anggota komunitas Muslim global yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal. Interaksi dengan aktor-aktor lain di ASEAN, OKI, dan PBB menciptakan ekspektasi eksternal yang mendorong ekspresi peran Indonesia sebagai pelindung HAM kawasan. Dalam perspektif teori Wendt, ketika ekspektasi sosial dan struktur hubungan mendukung, negara memiliki legitimasi untuk menampilkan identitas perannya secara konsisten. Hal ini menjelaskan mengapa dalam konteks Rohingya, identitas normatif Indonesia teraktualisasi dengan lebih kuat dan jelas.

Sebaliknya, dalam konflik Uighur, Indonesia tidak menampilkan respons yang mencerminkan identitasnya sebagai negara demokratis yang menjunjung HAM. Pemerintah menolak membahas laporan resmi pelanggaran HAM Tiongkok dalam sidang Dewan HAM PBB tahun 2022 dan memilih untuk menyampaikan pernyataan yang bersifat umum tanpa menyebut komunitas Uighur secara eksplisit. Dalam forum OKI, Indonesia juga tidak mendorong agenda kolektif yang menekan Tiongkok, meskipun organisasi masyarakat sipil di dalam negeri menuntut sikap yang lebih tegas. Faktor seperti hubungan ekonomi, proyek infrastruktur dalam skema Belt and Road Initiative, serta sensitivitas geopolitik membuat ekspresi identitas Indonesia menjadi

terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa identitas peran tidak hanya ditentukan oleh klaim internal, tetapi juga dibentuk melalui tekanan struktural eksternal dan kepentingan relasional. Teori konstruktivisme Wendt menekankan bahwa identitas bersifat intersubjektif, dan dalam kasus ini, absennya pengakuan dan dukungan eksternal menghambat artikulasi identitas Indonesia sebagai promotor HAM global.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi hak asasi manusia Indonesia terhadap dua konflik tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktur sosial tempat interaksi itu berlangsung. Dalam konflik Rohingya, eksistensi struktur normatif seperti ASEAN dan dukungan internasional terhadap isu kemanusiaan menciptakan kondisi yang kondusif bagi Indonesia untuk menampilkan identitas peran secara utuh. Sementara dalam kasus Uighur, ketidakhadiran struktur kolektif regional di Asia Timur dan dominasi kekuasaan Tiongkok memaksa Indonesia mengambil pendekatan diam dan defensif. Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB dan OKI tidak secara otomatis menjamin konsistensi ekspresi identitas karena relasi kekuasaan dan struktur sosial turut membatasi ruang gerak diplomasi. Hal ini menunjukkan bahwa identitas tidak hanya bersifat internal, melainkan sangat bergantung pada legitimasi yang diberikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, respons Indonesia terhadap kedua konflik ini memperkuat argumen bahwa diplomasi HAM merupakan cerminan dari identitas yang terus dinegosiasikan melalui interaksi sosial, bukan suatu entitas yang absolut.

Aplikasi teori konstruktivisme Alexander Wendt dalam penelitian ini menjelaskan bahwa identitas negara terbentuk melalui tiga elemen utama: internalisasi

nilai, pengakuan eksternal, dan interaksi sosial. Identitas tipe Indonesia sebagai negara demokratis dan Muslim moderat membentuk orientasi normatif kebijakan luar negerinya. Namun, identitas peran hanya dapat dijalankan ketika terdapat ekspektasi sosial dari aktor lain dan ruang struktur yang mendukung. Dalam konflik Rohingya, ketiganya hadir, sehingga ekspresi peran berjalan konsisten. Sementara dalam konflik Uighur, pengakuan eksternal dan ekspektasi sosial minim, serta tekanan geopolitik tinggi, sehingga identitas tidak bisa diekspresikan secara terbuka. Wendt menegaskan bahwa identitas bersifat relasional dan hanya bermakna dalam konteks struktur sosial; oleh karena itu, ketimpangan ekspresi peran Indonesia merupakan konsekuensi logis dari struktur yang berbeda dalam masing-masing konflik.

Dengan memperhatikan dinamika ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa ambivalensi Indonesia dalam diplomasi HAM terhadap konflik Rohingya dan Uighur bukanlah bentuk kontradiksi normatif yang disengaja, melainkan hasil dari negosiasi antara identitas nasional dan tekanan struktural eksternal. Ketika struktur sosial internasional mendukung, Indonesia dapat memainkan peran sesuai dengan identitasnya. Namun, dalam situasi yang didominasi oleh kekuasaan negara besar dan tidak ada dukungan normatif kolektif, diplomasi Indonesia menjadi lebih pragmatis dan berhati-hati. Kesimpulan ini tidak hanya memperjelas kondisi diplomasi HAM Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap studi identitas dalam teori hubungan internasional. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah hasil dari konstruksi

identitas yang terus-menerus dinegosiasikan dalam relasi sosial global yang tidak simetris.

4.2. Saran

Penelitian ini menjelaskan alasan di balik ambivalensi diplomasi hak asasi manusia Indonesia terhadap konflik Rohingya dan Uighur sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada pemangku kebijakan dan peneliti selanjutnya yang menaruh perhatian pada isu diplomasi berbasis nilai. Pertama, untuk pemangku kebijakan, penting untuk menjaga konsistensi antara identitas Indonesia sebagai negara demokratis dengan kebijakan luar negeri yang dijalankan, terutama saat Indonesia memegang peran strategis seperti anggota Dewan HAM PBB. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap norma universal, agar tidak menimbulkan kesan selektif yang dapat melemahkan posisi Indonesia di forum internasional. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan internasional terhadap peran Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan global. Kedua, untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis kasus serupa di negara lain, sehingga dapat memperkaya literatur mengenai hubungan internasional.